



**LAPORAN**

**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN NEGERI  
TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS**

**Tahun 2019**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja .....	3
<b>BAB II</b> .....	5
<b>METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Metode Penelitian .....	5
2.2. Populasi Dan Sampel .....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control .....	6
2.5. Teknik Analisis Data .....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
<b>BAB III</b> .....	9
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	9
3.1. Profilresponden .....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator .....	12
3.3. Indeks Persepsi KorupsiSatuan Kerja pada pengadilan .....	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayananSatuan Kerja pada pengadilan.....	23
<b>BAB IV</b> .....	25
<b>PENUTUP</b> .....	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi .....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4. Rencana Kerja**

##### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan



Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel1**

### **Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

<b>No</b>	<b>Ruang lingkup</b>
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**

**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

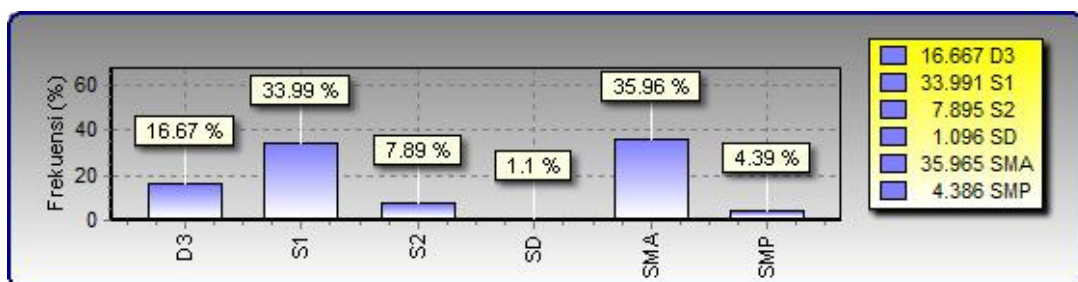
**3.1. Profilresponden**

3.1.1. Tingkat pendidikanresponden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**

No.	Pendidikan	Nilai	%
1	D3	76	16.67%
2	S1	155	33.99%
3	S2	36	7.89%
4	SD	5	1.10%
5	SMA	164	35.96%
6	SMP	20	4.39%
	<b>Total</b>	456	100.00%



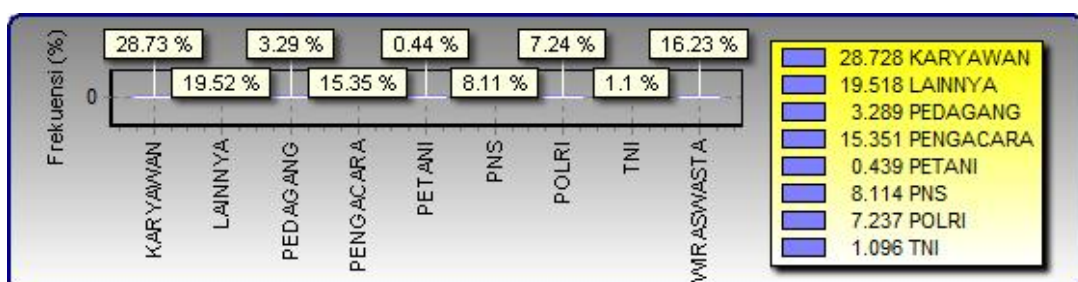
**Tingkat pendidikan responden**

3.1.2. Pekerjaanresponden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 46,67 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri tangerang memiliki pekerjaan sebagai Pekerjaan Lainnya.

**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**

No.	Pekerjaan	Nilai	%
1	KARYAWAN	131	28.73%
2	LAINNYA	89	19.52%
3	PEDAGANG	15	3.29%
4	PENGACARA	70	15.35%
5	PETANI	2	0.44%
6	PNS	37	8.11%
7	POLRI	33	7.24%
8	TNI	5	1.10%
9	WIRASWASTA	74	16.23%
	<b>Total</b>	456	100.00%



### 3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling

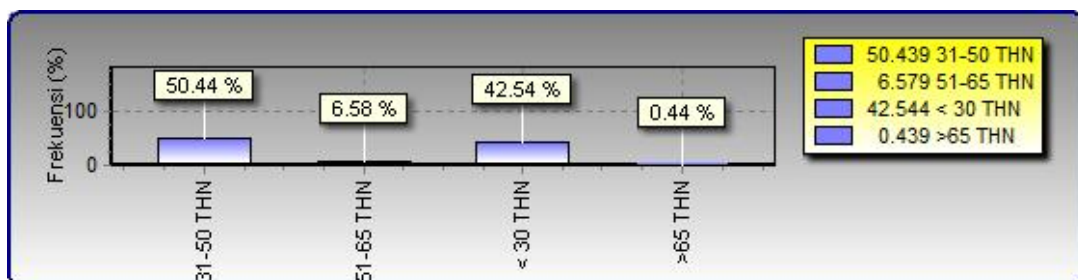
banyak berasal dari Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang

#### 3.1.4. Kelompok usiaresponden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21tahun s/d 60tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

**Tabel 7.**  
**Usia responden**

No.	Usia	Nilai	%
1	31-50 THN	230	%
2	51-65 THN	30	%
3	< 30 THN	194	%
4	>65 THN	2	%
	<b>Total</b>	456	100.00%



### 3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3.79**

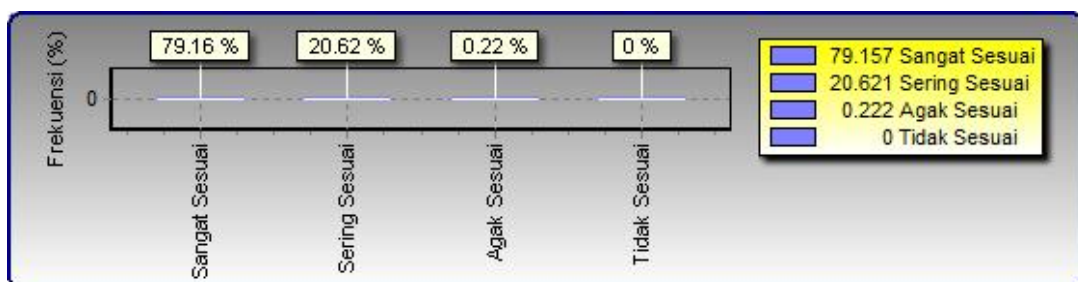
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

**Tabel 9.**

**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Sangat Sesuai	357	79.16
2	Sering Sesuai	93	20.62
3	Agak Sesuai	1	0.22
4	Tidak Sesuai	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**



#### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3.75**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Kerja pada

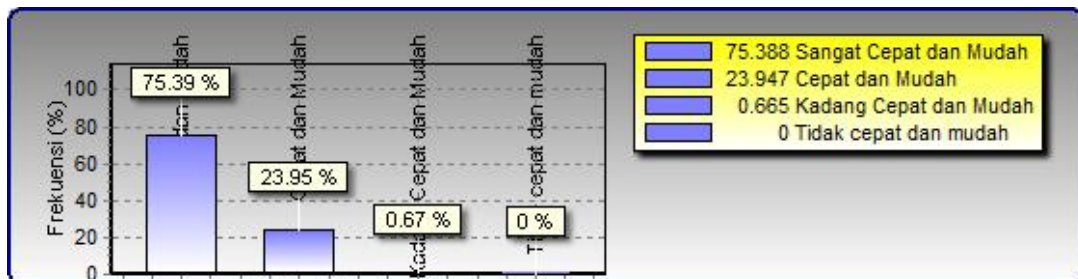
Pengadilan Negeri Tangerang bersih dari Korupsi.

**Tabel 10.**

**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat dan Mudah	340	75.39
2	Cepat dan Mudah	108	23.95
3	Kadang Cepat dan Mudah	3	0.67
4	Tidak cepat dan mudah	0	0.00
<b>Total</b>		456	100.00%

**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**



**3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3.86**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi.

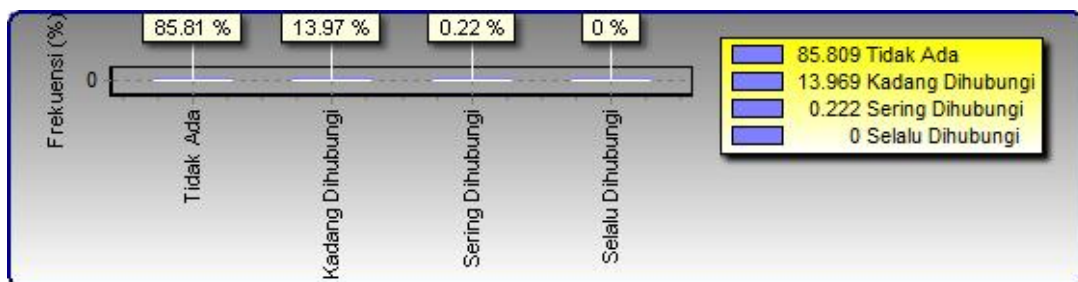
**Tabel 11.**

**Indeks pada indikator menjual pengaruh**

No	Kinerja	Frekuensi	%
----	---------	-----------	---

<b>1</b>	Tidak Ada	387	85.81
<b>2</b>	Kadang Dihubungi	63	13.97
<b>3</b>	Sering Dihubungi	1	0.22
<b>4</b>	Selalu Dihubungi	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

**Indeks pada indikator menjual pengaruh**



**3.2.4. Indikator TransaksiBiaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.74**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang cukup bersih dari Korupsi.

**Tabel 12.**

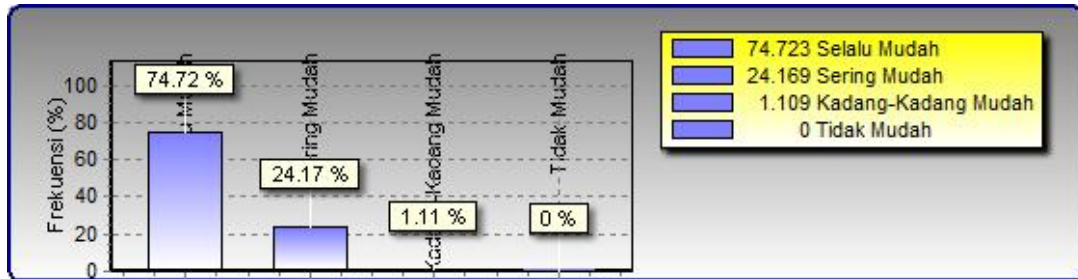
**Indeks pada indikator transaksi biaya**

<b>No</b>	<b>Kinerja</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Selalu Mudah	337	74.72
<b>2</b>	Sering Mudah	109	24.17
<b>3</b>	Kadang-Kadang	5	1.11



	Mudah		
<b>4</b>	Tidak Mudah	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

**Indeks pada indikator transaksi biaya**



**3.2.5. Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3.89**

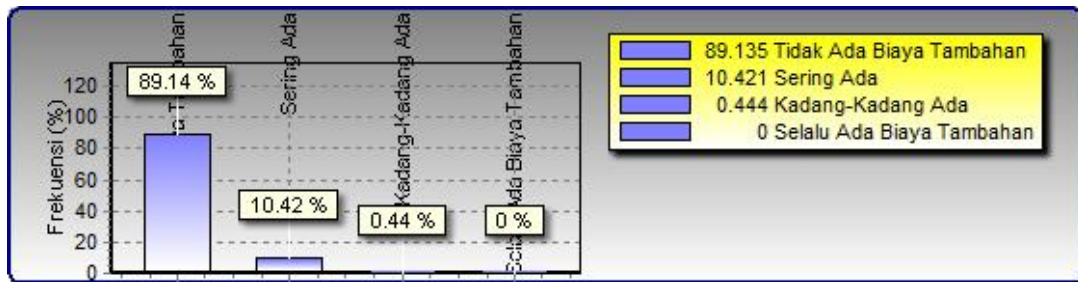
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

**Tabel 13.**

**Tabel indeks pada indikator Tambahan Biaya**

No	Kinerja	Frekuensi	%
<b>1</b>	Tidak Ada Biaya Tambahan	402	89.14
<b>2</b>	Sering Ada	47	10.42
<b>3</b>	Kadang-Kadang Ada	2	0.44
<b>4</b>	Selalu Ada Biaya Tambahan	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

### Tabel indeks pada indikator Tambah Biaya



#### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3.86**

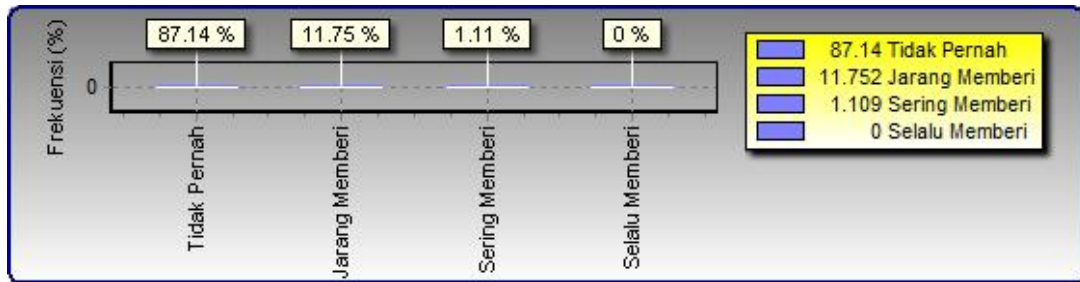
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

**Tabel 14.**

#### Indeks pada indikator Hadiah

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	393	87.14
2	Jarang Memberi	53	11.75
3	Sering Memberi	5	1.11
4	Selalu Memberi	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

#### Indeks pada indikator tambahan biaya



### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.89**

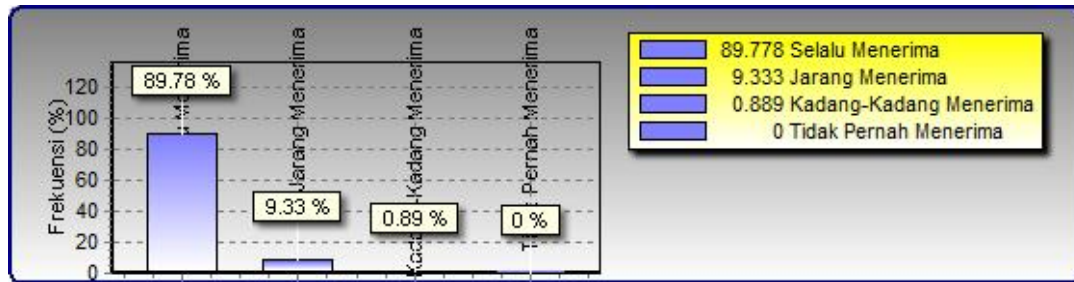
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Tangerang Bersih dari Korupsi

**Tabel 15.**

#### **Indeks pada Transparansi Biaya**

<b>No</b>	<b>Kinerja</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Selalu Menerima	404	89.78
<b>2</b>	Jarang Menerima	42	9.33
<b>3</b>	Kadang-Kadang Menerima	4	0.89
<b>4</b>	Tidak Pernah Menerima	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

#### **Indeks pada Transparansi Biaya**



### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3.73**

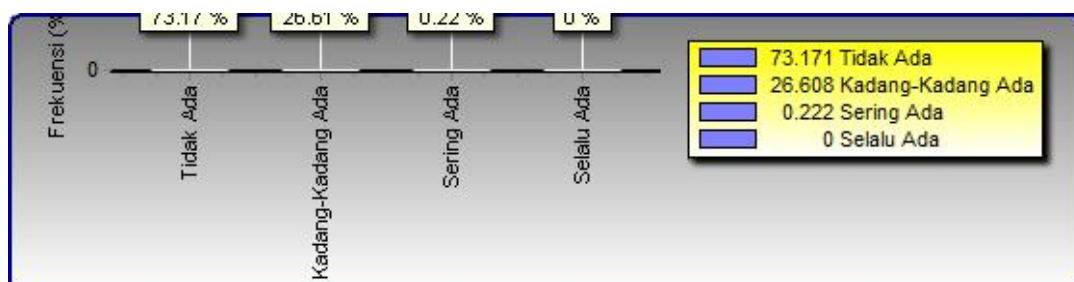
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

**Tabel 16.**

**Indeks pada indikator percaloan**

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Ada	330	73.17
2	Kadang-Kadang Ada	120	26.61
3	Sering Ada	1	0.22
4	Selalu Ada	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

**Indeks pada indikator Percaloan**



### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3.90**

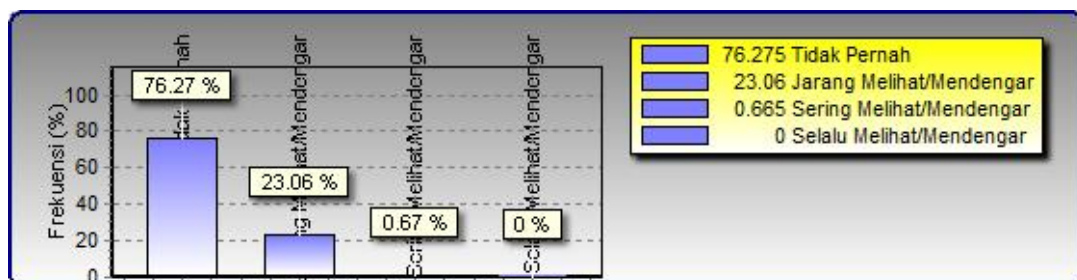
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari tindakan Percaloan.

**Tabel 17.**

**Indeks pada indikator perbuatan curang**

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	344	76.27
2	Jarang Melihat/Mendengar	104	23.06
3	Sering Melihat/Mendengar	3	0.67
4	Selalu Melihat/Mendengar	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

**Indeks pada indikator perbuatan curang**



### 3.2.10. Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan

hasil pada index **3.76**

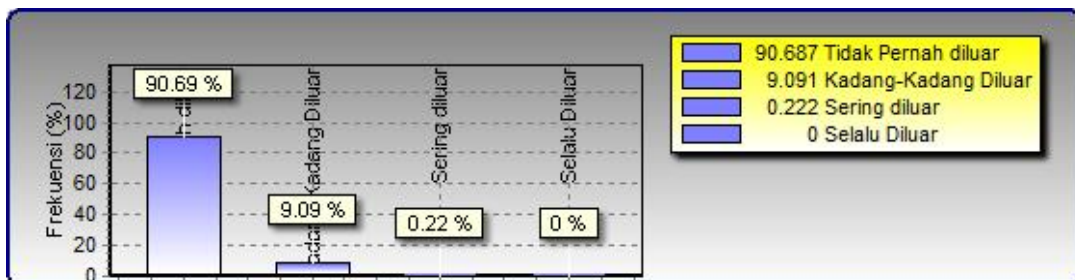
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi.

**Tabel 18.**

**Indeks pada indikator Transaksi Rahasia**

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah diluar	409	90.69
2	Kadang-Kadang Diluar	41	9.09
3	Sering diluar	1	0.22
4	Selalu Diluar	0	0.00
	<b>Total</b>	456	100.00%

**Indeks pada indikator Transaksi Rahasia**



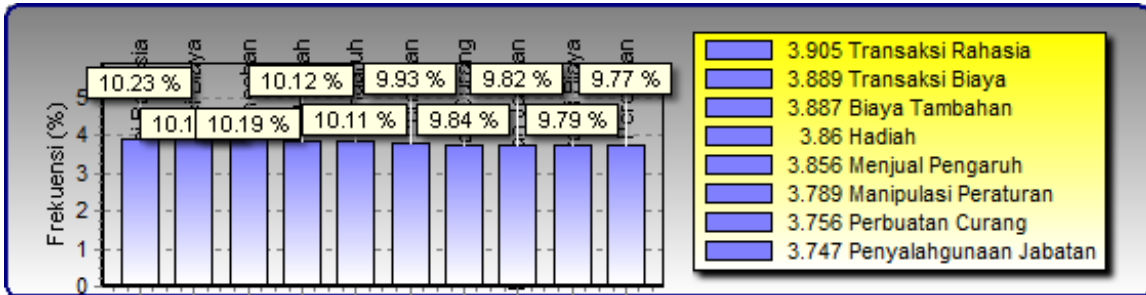
**3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 3,82

**Tabel 19.**  
**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada**  
**Pengadilan Negeri Tangerang**

<b>No</b>	<b>Unsur Pertanyaan</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>
<b>1</b>	Manipulasi Peraturan	<b>3.79</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>2</b>	Penyalahgunaan Jabatan	<b>3.75</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>3</b>	Menjual Pengaruh	<b>3.86</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>4</b>	Transaksi Biaya	<b>3.74</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>5</b>	Biaya Tambahan	<b>3.89</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>6</b>	Hadiah	<b>3.86</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>7</b>	Transparansi Biaya	<b>3.89</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>8</b>	Percaloan	<b>3.73</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>9</b>	Perbuatan Curang	<b>3.76</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
<b>10</b>	Transaksi Rahasia	<b>3.90</b>	<b>Bersih dari Korupsi</b>
	<b>Total</b>	<b>3.816</b>	

**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada  
Pengadilan Negeri Tangerang**



Indeks 3,82 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.00

**Tabel 20.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi



### **3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 21.**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan**  
**Satuan Kerja pada pengadilan**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan</b>
1.	Jadwal Sidang Harus Tepat Waktu
2.	mohon perhatiannya kepada posbakum bahwa pembuatan draf masih banyak kesalahan dalam pembuatan draf permohonan.
3.	Supaya petugas lebih menerapkan 3 S
4.	Penjaga wanita agar disediakan
5.	Kamar mandi harus ditingkatkan kebersihannya



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.82** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3.79**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3.75**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3.86**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3.74**
5. Indikator, Biaya Tambahan mendapat indeks **3.89**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3.86**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3.89**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3.73**
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat indeks **3.76**
10. Indikator, Transaksi Rahasia mendapat indeks **3.90**

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2019 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,82 atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator 3,73 memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.